

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi dan kesadaran memberikan perubahan pada diplomasi publik secara signifikan (Habermas, 1989). Pada akhirnya, komunikasi menggeser paradigma kerja menjadi paradigma komunikasi, sehingga penentuan dalam perubahan sosial tidak hanya sekedar berkembangnya teknologi dan produksi namun sebuah proses belajar. Seiring berjalannya waktu, masyarakat dapat mudah berubah jika diintegrasikan pada tindakan yang komunikatif melalui teknologi dan faktor-faktor lainnya. Tindakan komunikatif ini merupakan sebuah interaksi dengan tujuan memahami satu sama lain dengan adanya kesepakatan secara kesadaran. Melalui tindakan komunikatif, setiap aktor berusaha mengontrol semua Tindakan berdasarkan sebuah pertimbangan dan pemahaman bersama secara rasional. Hal ini menjadi pondasi direalisasikannya sebuah dialog terbuka guna memunculkan rasa saling memahami.

Setiap negara harus memiliki kesadaran konsekuensi atas keberadaannya dalam sistem internasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah komunikasi di setiap negara hingga tercapainya sebuah kondisi yang setara, sehingga setiap negara berupaya sebaik mungkin agar suara mereka dapat terdengar dan diterima oleh negara lain. Pentingnya sebuah pemahaman dan kesadaran setiap aktor mendorong berkembangnya studi diplomasi publik. Diplomasi publik disebut juga *battle of ideas*, karena dalam diplomasi ini ada usaha dalam menjangkau isi pikiran di setiap aktor mulai negara ataupun aktor bukan negara. Setiap negara berupaya dalam

menyebarkan masing-masing tujuan negaranya, dengan menciptakan opini publik secara positif yang memudahkan dalam mendapatkan respon baik dari negara-negara lain.

Seringkali masyarakat memahami diplomasi digital merupakan sebuah penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan internet guna mencapai suatu tujuan negara dalam berdiplomasi. Digital diplomasi bukan hanya sekedar media dalam bertukar informasi dan penggunaan internet. Namun, digital diplomasi sebagai sebuah strategi dalam memberikan perubahan melalui kolaborasi virtual, alat digital untuk membangun dan memperbaiki citra atau reputasi serta memperluas pengaruh dan relasi di dunia internasional (Holmes, 2015). Kemampuan dan kekuatan sebuah platform media sosial para tatanan negara menjadi sangat penting dalam memengaruhi persepsi publik. Media sosial menjadi sebuah sarana dalam melakukan sebuah komunikasi secara cepat dan dekat dengan aktor non negara lainnya.

Diplomasi digital dapat menjadi alat positif yang digunakan oleh pemerintah dalam tata negara modern. Kemajuan teknologi dan media sosial telah menandai lahirnya era digital. Bidang diplomasi ini bukan hanya terimbas, namun dapat menjadi entitas yang memiliki manfaat dan banyak dampak positif dari perkembangan digital tersebut. Dan hal ini mendorong lahirnya era baru dalam diplomasi. Realisasi teknologi digital telah membuat terbentuknya cara kerja dunia berubah menjadi modern, hingga terbentuknya bentuk diplomasi baru yaitu dikenal sebagai diplomasi digital.

Diplomasi digital membawa dampak yang menguntungkan. Karena, diplomasi ini banyak digunakan untuk meraih kepentingan nasional melalui pemanfaatan media sosial. Jejak digital dalam diplomasi berhasil mengubah kegiatan diplomatik ke platform virtual. Hampir seluruh dunia menyatakan bahwa proses digitalisasi diplomasi berhasil menjadi pelengkap untuk diplomasi tradisional. Hadirnya diplomasi digital ini memberi pernyataan supremasi yang tegas bahwa dalam diplomasi modern terdapat teknologi baru didalamnya.

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai referensi, pedoman dan panduan agar dapat menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama merupakan penelitian karya Shamira dkk. (2022) dengan penelitian yang berjudul “Strategi Tiongkok Dalam Memulihkan Citra Akibat Covid-19”. Penelitian membahas mengenai upaya Tiongkok memulihkan citra negaranya menggunakan teori diplomasi multijalur yang pertama yaitu melalui aktor pemerintah dan yang ke sembilan yaitu jalur media komunikasi. Melalui jalur pemerintah, para pemerintah Tiongkok memanfaatkan twitter untuk melakukan diplomasi dan menyalurkan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada dunia. Sedangkan melalui media komunikasi, pembangunan citra Tiongkok dilakukan melalui media berita dan juga media film.

Yang kedua ialah penelitian karya Kartikasari dan Tundjung (2022) dengan penelitian yang berjudul “Penggunaan Twitter Dalam Diplomasi Digital Tiongkok di Masa Pandemi Covid 19”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Tiongkok dalam menggunakan sosial media twitter (*twiplomacy*). *Twiplomacy* ini digunakan sebagai media diplomasi digital selama pandemi Covid-19 untuk memperbaiki citra

negaranya dan memberikan kontrobusi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat internasional. Melalui twitter, pemerintah china menyampaikan pandangannya serta mengembangkan upaya kolektif dan kerjasama dalam menghadapi pandemi.

Yang terakhir ialah penelitian karya Hayati dkk. (2022) dengan penelitian yang berjudul “Diplomasi *Wolf Warrior* Tiongkok Dan Relasi Tiongkok-Australia Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas mengenai tindakan diplomat yang agresif dan tidak takut mengkritik negara lain secara terbuka. Jika dilihat dari sisi politik kekuasaan, posisi Tiongkok sebagai negara yang memiliki kepentingan dan kekuatan yang dapat mengubah konstelasi politik dunia. Melalui diplomasi komunikasi ini, dipandang sebagai bagian dari rencana jangka panjang Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi adanya ketertarikan yang kemudian dibahas di bab-bab selanjutnya, dengan sebuah Rumusan Masalah, yaitu: “Bagaimana Upaya Diplomasi Digital Tiongkok Pada Era Pandemi Covid-19?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Secara Umum

Adanya penelitian ini ditulis ialah agar memudahkan dalam membuktikan hasil dari penelitian yang akan menciptakan sebuah pengetahuan dan ilmu baru yang dapat dijadikan untuk memecahkan, mengantisipasi, memahami dan menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, penelitian ini ditulis sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan sebuah gelar Sarjana (S-1) dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Penelitian Secara Khusus

Adanya penelitian ini ditulis guna mengetahui bagaimana Upaya negara Tiongkok dalam melakukan diplomasi digital pada era Covid-19 dari proses hingga keberhasilannya.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab sebuah rumusan masalah diatas, dijelaskannya kerangka pemikiran sebagai berikut:

1.4.1 Diplomasi Publik

Hubungan internasional adalah sebuah bagian dari ilmu politik yang meneliti tentang tindakan dan kebijakan semua aktor mulai dari non negara hingga negara seperti individu, organisasi, kelompok, Perusahaan multinasional, hingga para petinggi negara guna mencapai tujuan negaranya. Seiring berjalannya waktu, beberapa hal berkaitan seperti aktor, situasi dunia dan teknologi informasi mengalami perkembangan serta perubahan sehingga adanya pergeseran yang terjadi menjadi diplomasi modern yaitu diplomasi public yang sebelumnya merupakan diplomasi tradisional. Teknologi informasi mempengaruhi perkembangan dunia sejalan dengan waktu, menyebabkan alat diplomasi memiliki pilihan yang beragam. Diplomasi tradisional banyak mengandung isu-isu yang berkaitan dengan hard power atau perang. Namun, sekarang munculnya beberapa isu lainnya yang menjadi incaran dari diplomasi publik seperti lingkungan, pariwisata, budaya, hak asasi manusia hingga kesehatan (Fulton, 1998).

Diplomasi publik salah satu perkembangan dari diplomasi tradisional. Diplomasi publik mengupayakan tercapainya tujuan suatu negara dengan

memberikan opini public terhadap negara lain melalui beberapa instrument seperti radio, film, digital, budaya, sosial media dan televisi dengan menjalin keuntungan dan komunikasi yang baik. Diplomasi publik memiliki tujuan untuk mempengaruhi suatu negara bersangkutan dan memfasilitasinya tentunya untuk mencari keuntungan balik, dilakukan melalui unsur penting dalam merealisasikan diplomasi publik yaitu *soft power*.

Diplomasi publik berupa sebuah pendekatan diplomasi dengan melibatkan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah di suatu negara secara langsung. Diplomasi publik memiliki tujuan utama ialah untuk membangun sebuah hubungan, memberikan pemahaman, dan mempublikasikan kepentingan nasional negara nya menggunakan komunikasi yang dilakukan secara terang-terangan dan terbuka dan berbagai kegiatan seperti pendidikan, budaya, serta banyak kegiatan lain yang berorientasi pada publik. Diplomasi publik memberikan Gambaran bahwa pentingnya sebuah komunikasi melalui dialog dua arah. Diplomasi diharapkan dapat membantu kemampuan untuk beradaptasi langsung secara publik untuk memperkuat hubungan di tingkat global (Potter, 2006).

Sebuah opini yang kuat merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan politik, seperti halnya kekuatan ekonomi, militer dan hubungan baik antar negara. Diplomasi publik juga dikenal memiliki sejarah panjang di beberapa negara dan menjadi instrumen politik. Berikut merupakan tujuan diplomasi publik; (1) yang pertama ialah meningkatkan dan mengembangkan pemikiran masyarakat tentang suatu negara, dalam hal in membuat mereka memperbaiki citra masyarakat, dan mengubah pandangan mereka tentang negara; (2) Meningkatkan apresiasi

masyarakat terhadap suatu negara, hal ini bertujuan untuk mengubah persepsi positifnya dan menyamakan pendapat mereka terhadap suatu masalah di negara; (3) Meningkatkan relasi dengan banyak negara dalam banyak aspek seperti pariwisata, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik (E.H. Carr, 1946).

Diplomasi publik dipercaya menjadi sebuah proses dalam komunikasi dua arah antar pemerintah terhadap masyarakat internasional. Diplomasi publik bertujuan dengan bekal pengertian meliputi sikap, negara, budaya, institusi, tujuan serta adanya sebuah pengambilan keputusan di suatu negara (J. Wang, 2006). diplomasi publik merupakan sebuah pergerakan untuk menaikkan kualitas komunikasi pada masyarakat dan negara. Hal ini memiliki dampak di berbagai bidang terutama pada bidang politik, sosial, ekonomi hingga dalam realisasinya tidak adanya tindakan pemerintah yang membatasi (E.H. Carr, 1946).

Diplomasi publik ialah sebuah instrument dari *soft power* melalui pergerakan mempengaruhi masyarakat hingga negara lain dalam hal yang positif. Hingga mengubah cara pandang organisasi atau masyarakat di negara lain (Mellisen, 2006). Adanya penjelasan tersebut, menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat dipromosikan dan diwujudkan melalui proses diplomasi publik. Dalam promosi ini dijalankan melalui sebuah informasi, pemahaman dan pengaruh publik negara lain. Proses diplomasi dapat berada pada luar negeri maupun dalam negeri dengan menggunakan konsep mempengaruhi target sehingga berada di barisan yang sama (Potter, 2006).

Pesatnya perkembangan diplomasi publik karena dipengaruhi dengan gagalnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antar

negara melalui diplomasi jalur pertama. Sehingga, hal ini menyebabkan berkembangnya pikiran guna membuat diplomasi publik lebih maju terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di ranah internasional (McDonald, 1991). Terjadinya hal ini karena diplomasi publik memiliki ciri khas sebagai kelompok bukan hanya sebagai pemerintah, hal ini mempengaruhi informal efektif dalam menghilangkan rasa takut, menurunkan tensi ketegangan dan meningkatkan rasa ketergantungan antar pihak (Fulton, 1998).

Diplomasi publik memiliki tugas untuk melengkapi usaha-usaha yang telah dijalankan pemerintah pada diplomasi satu jalurnya. Untuk mencapai titik berhasil, diplomasi publik diharuskan mampu menjadi jalan dalam bernegosiasi, bertukar informasi pada sebuah konflik yang ada di dunia. Hal ini membutuhkan kerjasama baik dari aktor non-negara hingga negara yang bertujuan menaikkan nilai tawar di suatu negara. Aktor non-negara ditujukan sebagai jalan yang mampu berkomunikasi dua arah dengan target terutama untuk mencapai tujuan bersama dengan saling bertukar informasi, mempengaruhi serta merealisasikan kebijakan yang ada (Fulton, 1998).

Sejak berakhirnya Perang Dunia I dan pada era Perang Dingin, diplomasi publik ini mulai mendominasi. Istilah yang digunakan saat itu adalah *democratic diplomacy* (J. Wang, 2006). Realisasi diplomasi publik terikat pada komunikasi kebijakan luar negeri terhadap publik manca. Hal ini menyatakan bahwa diplomasi publik memiliki porsi dan unsur yang beragam dan besar, maka dari itu hal utama dari diplomasi ini adalah sebuah rancangan strategi komunikasi.

1.4.2 Diplomasi Digital

Diplomasi digital merupakan perkembangan dari konsep diplomasi publik yang merealisasikannya menggunakan pemanfaatan dari sebuah media sosial melalui teknologi komunikasi dan informasi dalam aktivitas suatu negara terutama dalam pengambilan keputusan dalam masalah atau pengambilan dalam kebijakan luar negeri. Diplomasi digital menjadi salah satu strategi untuk memberikan perubahan melalui kolaborasi virtual dan alat digital. Kolaborasi virtual cenderung pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan bergeraknya komunitas online. Diplomasi digital digunakan untuk jangkauan yang lebih luas dengan lebih mudah (Bjola dan Holmes, 2015:33-38).

Diplomasi digital merupakan sebuah instrumen yang memudahkan dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Adanya media sosial menciptakan kesederhanaan saat berkomunikasi guna tercapainya sebuah kepentingan, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, budaya, hingga pembentukan citra negara (Albert Triwibowo, 2020). Diplomasi digital ini telah diterapkan di berbagai negara, salah satunya adalah Tiongkok. Terutama pada saat adanya pandemi Covid-19 dan diadakannya *lockdown* (Hengbo Zhu dkk, 2020).

Digitalisasi diplomasi ialah sebuah proses jangka panjang yang memiliki pengaruh besar dalam penggunaan teknologi yang inovatif (Manor, 2016). Secara konseptual, diplomasi digital ialah pemanfaatan dalam menggunakan teknologi dan internet guna merealisasikan tujuan diplomatic melalui komunikasi informasi (Hanson, 2010). Selain itu, diplomasi digital juga digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kebijakan luar negeri (Foreign and Commonwealth Office, 2012).

Namun, digital diplomasi bukan sekedar penggunaan internet dalam mendapatkan dan memberikan pengetahuan. Namun, sebuah rancangan dalam upaya peningkatan dengan melewati kolaborasi virtual, alat digital yang digunakan untuk membangun reputasi suatu negara serta untuk memperluas pengaruh dan jaringan dalam dunia Internasional (Holmes, 2015).

Digitalisasi diplomasi publik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor utama yaitu mulai dari faktor nasional hingga organisasi. Hal ini terjadi disebabkan teknologi digital yang dijalankan guna mengatasi keterbatasan diplomasi tradisional, membatasi perwakilan fisik dan memperluas jangkauan kegiatan diplomasi publik (Manor, 2019). Oleh sebab itu, diplomasi digital membutuhkan aktor dan media yang tepat dalam pengelolaan di era digital dalam memanfaatkan teknologi melalui komunikasi dan informasi untuk pengumpulan, penyebaran dan analisis informasi.

Konseptual praktik diplomasi mengalami pergeseran hingga muncul diplomasi digital yang berfokus pada komunikasi masyarakat global dengan memanfaatkan media sosial. Manfaat perkembangan Informasi dan teknologi akan banyak berdampak bagi setiap negara yang merealisasikan dalam mengembangkan diplomasinya dengan memanfaatkan algoritma media sosial. Berbeda seperti diplomasi tradisional, diplomasi digital berhasil mengubah komunikasi antara pemerintah hingga ke semua level aktor, menciptakan hubungan yang lebih mudah diakses, inklusif dan transparan. Misalnya, sebuah pemimpin negara memposting melalui sosial media untuk memberi tahu pengikutnya terkait apa yang sedang dilakukannya, misalnya pertemuan dengan pemimpin negara lain dan apa yang

sedang didiskusikan. Dengan mempersonifikasikan beberapa postingan tentang kegiatan yang dilakukan pemerintah, diplomat, kedutaan, pengurus atau pemimpin negara lainnya,

Hal ini membuat publik memiliki pola pikir yang berkembang bahwa masyarakat akan merasa dilibatkan dalam beberapa percakapan penting melalui fitur membalas, memposting ulang, tweet ulang, komen dan beberapa fitur lainnya. Diplomasi digital dijalankan melalui banyak platform media sosial sebagai jembatan dalam berkomunikasi, seperti twitter, facebook, Instagram dan media sosial lainnya. Digital diplomasi biasanya dipahami sebagai teknologi komunikasi, penggunaan internet serta informasi dalam mencapai sebuah tujuan. Digital diplomasi merupakan sebuah strategi menuju perubahan dalam alat digital, kolaborasi virtual dan sebagai media dalam memperluas jaringan serta memperbaiki citra dan reputasinya dalam dunia internasional, tidak hanya sebatas untuk penggunaan internet.

Diplomasi digital memiliki beberapa instrumen, dan instrumen ini yang akan dibahas dan dikaitkan dengan penelitian penulis. bagian tersebut yaitu, manajemen pengetahuan dan informasi, diplomasi publik, respon komunikasi dan konsular, respon bencana, kebebasan internet dan perencanaan kebijakan (Hanson, 2012). Bagian pertama yaitu manajemen pengetahuan, yang mana diplomasi digital ini digunakan untuk mengumpulkan segala informasi seperti pengetahuan departemen mulai dari divisi divisi hingga pemerintahan. Dari informasi yang diperoleh dapat dibagikan, dipertahankan hingga digunakan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan nasional. Selain itu, guna mengumpulkan arus informasi

sebanyak-banyaknya untuk membantu dalam merespons atau mengantisipasi gerakan sosial dan politik, serta dalam membuat kebijakan atau keputusan demi kepentingan nasional (Hanson, 2012).

Pada tahun 2010, diperkirakan pertumbuhan informasi digital meningkat lebih dari enam kali lipat yaitu 988 miliar gigabyte. Pada awal abad ke dua puluh satu, pengguna komputer dapat mengirimkan email hingga 25 triliun per tahun. Pada tahun 2010, setiap tahunnya ada 70 persen dari seluruh informasi yang dihasilkan di dunia asalnya dari video online, email dan web. Adanya perubahan drastis dari diplomasi digital, mengubah sifat pemerintahan dan mempercepat difusi kekuasaan. Sumber informasi dari sosial media menjadi penting untuk memahami dunia sekitar bagi kementerian luar negeri (Hanson, 2012).

Bagian kedua diplomasi publik digital yaitu guna menjaga kontak secara online dan memanfaatkan alat komunikasi baru melalui pesan-pesan utama serta untuk mempengaruhi influencer online secara besar. Aturan dasar diplomasi publik bergeser karena munculnya media sosial di dunia. Dahulu, seorang diplomat yang kompeten dapat menjangkau hingga ratusan atau mungkin ribuan orang melalui keterlibatan eksternal. Terkadang, untuk menjangkau ratusan ribu atau jutaan orang juga melalui radio, surat kabar dan televisi, namun hal itu memerlukan penjaga gerbang (Hanson, 2012).

Munculnya media sosial telah menggeser dinamika lama dari diplomasi tradisional. Di beberapa bagian negara, secara efektif mengoperasikan media globalnya masing-masing. Yang telah terjangkau hingga delapan juta orang secara langsung melalui lebih dari 600 platform media sosial. Wakil Asisten Menteri

Urusan Publik US untuk Strategi Digital, Victoria Esser menyatakannya sebagai berikut “Kami selalu berupaya memperluas cara kami dapat memberikan informasi dan terlibat media sosial menawarkan kami cara untuk melakukan hal tersebut secara real-time dengan jangkauan yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita harapkan dengan diplomasi publik tradisional”.

Selanjutnya ialah Komunikasi dan Respon Konsuler ialah untuk menciptakan adanya sebuah jalan dalam komunikasi secara dua arah dan langsung dengan warga negara yang sedang berada di luar negeri yang dapat dikelola dalam situasi krisis. Dengan sekitar 6 miliar pelanggan telepon seluler, sebagian besarnya merupakan ponsel pintar yang dapat mengakses web, sehingga kementrian luar negeri secara teknis dapat dengan mudah menjangkau warga negaranya sedang berada di luar negeri. Urusan Konsuler Mengukur upaya ediplomasi di Biro urusan Konsuler sulit dilakukan, karena sebagian besar pekerjaannya terfokus pada digitalisasi seluruh proses konsuler, mulai dari pemrosesan visa hingga pemeriksaan keamanan dan teknologi paspor. Namun, di luar upaya-upaya substantif ini, ada beberapa ediplomasi spesifik lainnya yang sedang dilakukan dengan inisiatif. Misalnya, ada petugas yang berdedikasi untuk mengelola situs utama konsuler, seperti akun Twitter dan Facebook dan travel.gov (Hanson, 2012).

Respon bencana ialah bagian dari diplomasi digital yang berguna dalam memanfaatkan kekuatan teknologi penghubung dalam situasi tanggap bencana. Hal ini dilakukan dengan cara untuk memanfaatkan media sosial. Direalisasikan selama di suatu negara mengalami situasi krisis. Misalnya, melakukan pra-iklan dengan

hashtag Twitter yang seragam untuk digunakan dalam situasi darurat atau bahkan minta persetujuan pemerintah melalui kampanye di sosial media (Hanson, 2012).

Kebebasan internet yaitu teknologi diciptakan guna menjaga internet bersifat terbuka dan bebas. Hal ini mempunyai tujuan guna mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat serta melemahkan otoriter didalam pemerintahan. Semua warga negara memiliki haknya dalam menggunakan media sosial untuk mengeluarkan suara atau aspirasinya kepada semua audiens hingga pemerintah. Selain itu, dengan adanya kebebasan internet ini akan menciptakan kebebasan komunikasi tanpa adanya batasan oleh waktu dan ruang. Karena, internet merupakan media untuk masyarakat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya (Hanson, 2012).

Perencanaan kebijakan ialah kumpulan sebuah rancangan yang merupakan dasar konsep dalam melaksanakan suatu hal. Selain itu, direalisasikan sebagai koordinasi, pengawasan dan perencanaan dalam pengambilan keputusan dalam ranah internasional di seluruh aspek secara efektif. Hal ini merupakan respons terhadap internasionalisasi birokrasi. Perencanaan kebijakan pada dasarnya ialah sebuah ikatan proses kegiatan mengenai apa yang terjadi dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Rangkaian proses kegiatan tersebut meliputi keadaan, peristiwa dan suasana sebelum pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu kebijakan (Hanson, 2012).

Adanya virus Covid-19 menyebabkan Tiongkok mengalami krisis karena dihadapkan dengan kritik negatif oleh dunia. Tiongkok dianggap sebagai penyebab dan sumber munculnya virus. Selain itu, Tiongkok dianggap sengaja menutupi

kebenaran tentang Covid-19. Hal ini membuat Tiongkok sadar bahwa citra negaranya menjadi buruk dan sedang dipertaruhkan sehingga menjadi acuan Tiongkok mengupayakan dalam mengembalikan citra baik bagi negaranya (Hanson, 2012).

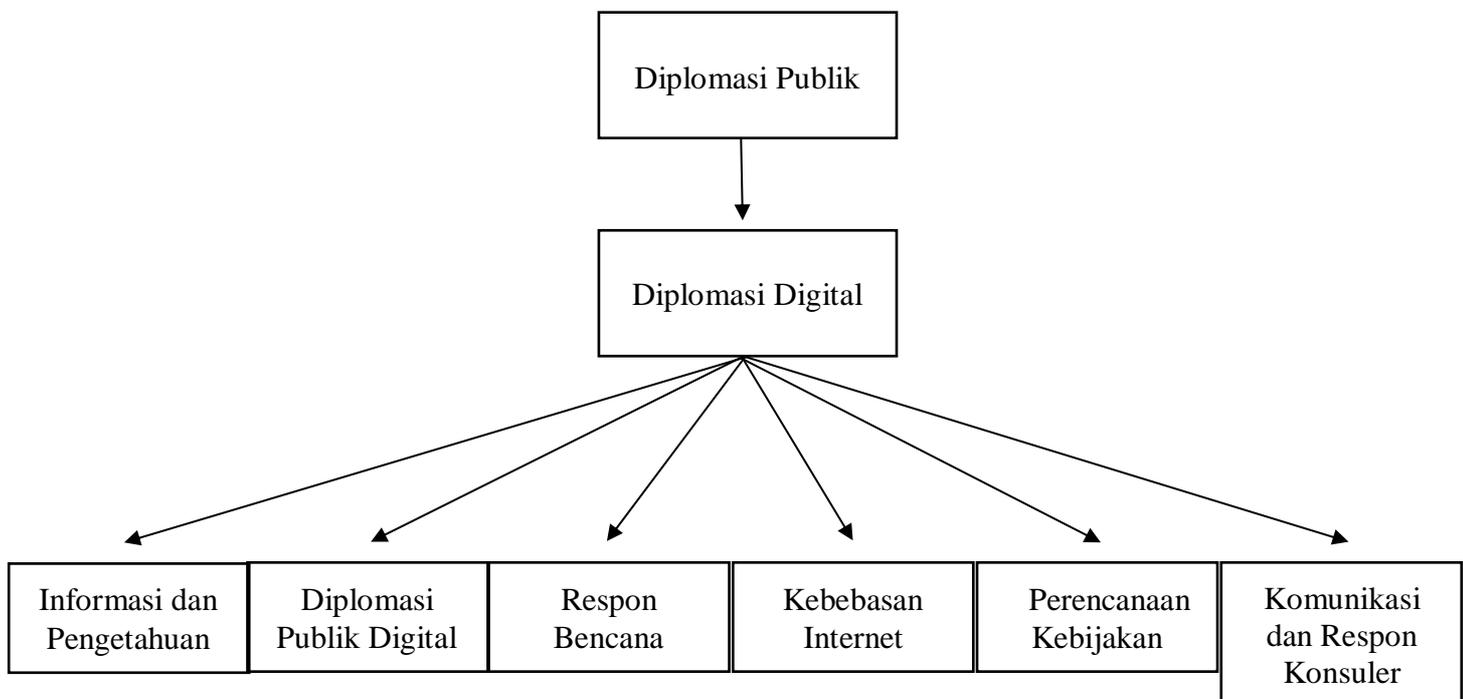
Banyaknya kritikan negatif terkait virus Covid-19 sehingga berdampak pada citra Tiongkok yang menjadi buruk. Citra yang buruk akan berdampak pada banyak aspek kehidupan di Tiongkok yaitu pada aspek pariwisata, perekonomian politik hingga sosial. Tiongkok selalu aktif dalam mengupayakan penolakan atas kritik mengenai negaranya. Melalui beberapa akun media sosialnya, Tiongkok sangat menunjukkan keinginannya dalam mempengaruhi dunia demi memulihkan citranya (Chris Alden & Kendrick Chan, 2021). Karena, memiliki citra yang baik akan membawa pada banyak dampak positif. Adanya opini publik yang positif akan memberikan pengaruh dalam upaya pemulihan citra.

Tiongkok dalam memulihkan citra negaranya, melakukan dengan menjalankan strategi yang bermacam-macam. Salah satu strategi yang digunakan oleh Tiongkok ialah diplomasi digital, dijalankan oleh 2 aktor penting yaitu negara dan media. Dalam kasus ini, posisi Tiongkok *state-centered*, sehingga memerlukan peran negara untuk mencapai tujuan. Namun, aktor non negara juga berkontribusi dalam pemulihan citra hanya saja tidak cukup dominan. Tiongkok menggunakan diplomat, pejabat, dan petinggi negara lainnya untuk ikut serta secara langsung dalam pemulihan citra dengan melakukan hubungan bilateral dan multilateral, berbagi informasi hingga menjalankan diplomasi-diplomasi publik lainnya.

Penelitian ini menggambarkan secara besar bagaimana konten digital berperan penting dalam konteks diplomasi publik melalui media online, dengan tujuan untuk mendorong kerjasama antar negara. Konten digital memiliki peran penting dalam merancang narasi yang mendalam, membentuk citra positif suatu negara dan memperdalam kolaborasi internasional. Konten digital, seperti video, film, artikel, dan kampanye media sosial yang dioptimalkan, cenderung membuat audiens global lebih mudah dalam memahami nilai-nilai yang terkandung. Pentingnya pengelolaan konten digital dalam diplomasi & negosiasi budaya terletak pada kemampuannya membuka dialog yang lebih mendalam dan inklusif di tingkat internasional.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan skema diatas, dipaparkan bahwa sintesa pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini ialah memberikan gambaran mengenai alur penelitian secara garis besar. Diplomasi publik merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mempengaruhi opini publik di negara lain dan dapat dilakukan melalui beberapa instrument, salah satunya ialah digital seperti radio, film, sosial media dan televisi untuk menjalin keuntungan dan komunikasi yang baik secara singkat dan cepat. Diplomasi digital merupakan perkembangan dari konsep diplomasi publik. Adanya perkembangan teknologi, diplomasi digital diperlukan untuk mengembangkan standar, pedoman, dan inovasi dalam mendukung diplomasi publik.

Pentingnya keterlibatan aktif dari beberapa lembaga yang berkaitan seperti, pemerintah, budaya, dan praktisi media dalam realisasi diplomasi digital. Kerjasama ini diperlukan untuk mencapai konten digital termasuk teks, gambar, video yang memiliki peran sangat penting dalam menyampaikan pesan dan tujuan kepada dunia. Dalam hal ini, strategi dan tujuan diplomasi digital yang akan dianalisis dan dijabarkan menggunakan beberapa faktor tersebut yaitu, informasi dan pengetahuan, diplomasi publik, komunikasi dan respon konsuler, respon bencana, kebebasan internet, perencanaan kebijakan. Lewat diplomasi digital, masing-masing negara memiliki saluran dalam menyalurkan pendapat mereka tanpa batas diplomatik.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan sintesa pemikiran diatas, maka penulis mengambil argument utama yaitu, Tiongkok melakukan upaya diplomasi digital sebagai sarana dalam membangun pemahaman bersama, sebagai alat penyampaian informasi, meredakan konflik, memperkuat jembatan antarnegara dan hubungan diplomatik. Dalam penelitian ini, strategi dan tujuan diplomasi digital yang dilakukan oleh Tiongkok akan dianalisis dan dijabarkan menggunakan beberapa faktor tersebut yaitu, informasi dan pengetahuan, diplomasi publik digital, komunikasi dan respon konsuler, respon bencana, kebebasan internet, dan perencanaan kebijakan yang akan dikaitkan sehingga mencapai tujuan Tiongkok.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang memiliki tujuan menggambarkan bagaimana upaya negara Tiongkok. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelihan” dinyatakan oleh (Arikunto, 2013). Sedangkan tujuan utama penelitian deskriptif adalah “Menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat” (Sukardi, 2003).

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian diatas, penulis mengambil jangkauan waktu agar lebih fokus terhadap analisisnya. Jangkauan waktu dalam penelitian ini mulai dari tahun 2020, awal mulanya pandemi Covid-19 yang menyebar luas di berbagai negara hingga tahun ini saat meredanya pandemi Covid-19 serta isu-isu buruk terhadap negara Tiongkok.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data dalam pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur (Sugiyono, 2019). Data sekunder didapatkan melalui orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, yang mana data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan, 2002).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena

sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat, sehingga bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas (Hendryadi, 2019).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ingin dibahas oleh penulis dalam skripsi ini terbagi atas empat bab, dengan sistematika urutan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sintesa penulisan.

Bab II Pembahasan: Bagian ini mulai membahas mengenai upaya Tiongkok dalam melakukan diplomasi digital di era pandemi Covid-19, berupa proses hingga keberhasilannya melalui poin pada kerangka teori yaitu meliputi informasi dan pengetahuan, diplomasi publik digital, respon bencana.

Bab III Pembahasan: Bagian ini melanjutkan pembahasan mengenai upaya Tiongkok dalam melakukan diplomasi digital di era pandemi Covid-19 yang mulai dibahas pada bab II, dalam bab ini melanjutkan pembahasan melalui poin pada kerangka teori yaitu kebebasan internet, perencanaan kebijakan, komunikasi dan respon konsuler.

Bab IV Penutup: Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari Bab I-Bab III.